

## PERUBAHAN NILAI NILAI BUDAYA DALAM PROSES MODERNISASI DI INDONESIA

**Yuhasnil**

Dosen PNSD STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh

Email : yuhasnil.yy@gmail.com

### **Abstract**

*Along with the rapid flow of modernization, the changes that occur in all aspects of people's lives are increasingly inevitable. Not only does this change occur within the scope of social structures and social institutions but also in the fields of ethics, morals, and cultural values of the community. Cultural values are interpreted as something abstract that is used as a guide and general principles in acting and behaving. Changes occur in the form of culture such as ideas, values, norms, rules, activities and patterns of human actions in society and objects produced by humans. In the current era of globalization which is marked by the revolution of science, technology, information and telecommunications sector, it also significantly influences changes in the culture like the values and governance of people's lives. The transformation in determining accelerative changes for some parties may result in cultural lag and can also be in the cultural shock.*

### **Pendahuluan**

“Kehidupan di dunia ini mungkin akan berakhir ndengan renekan ketimbang jeritan”. Robert H. Lauer barangkali sengaja mengutip ungkapan bijak sastrawan dunia Thomas S. Eliot untuk menggambarkan perspektif perubahan dalam bukunya *Perspektif tentang perubahan sosial (Rineka Cipta, Jakarta , 1993)* Menurut peraih hadiah nobel Kesusasteraan tahun 1984 kelahiran St. Louis, Missiouri (USA) ini, dunia mungkin akan terjerumus ke dalam masa depan suram, diledakkan oleh komplik , menderita ketidakadilan, yang dengan nekat mencoba mencari bentuk kehidupan yang lebih berarti.

Sudah merupakan sipat dasar manusia bahwa dalam pergulatan hidupnya senantiasa mengalami perubahan. Yang menjadi persoalan adalah gerak dinamika perubahan itu akan membawa manfaat dan ke arah yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat dan justru sebalik nya ? tentunya, terhadap masalah ini kita tidak perlu jauh melihat bagaimana gerak perubahan itu memang lebih banyak dalam bentuk “ yang tidak diharapkan” ketimbang “ yang di harapkan”.Jika kita membuka kembali lembaran album sejarah, misalnya, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang berkepribadian tinggi, memiliki sopan santunnan elok budi, ramah, suka menolong, mempunyai etika dan moral yang tinggi, religius, dan lain sebagainya. Namun, apa yang terjadi sekarang, mungkin semua gambaran sosok manusia yang demikian “hanya dapat kita baca lewat sebuah buku”. Contoh yang lebih kongkrit lagi, misalnya, dahulu wilayah minangkabau banyak melahirkan tokoh pemimpin *elit nasional* yang sangat menentukan dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, namun , saat ini semua itu sudah seakan tinggal “ratapan”.

Seiring dengan deras nya arus modernisasi , perubahan yang terjadi dalam segala aspek kehidupan masyarakat semangkin tak terelakkan. Perubahan itu tidak saja terjadi dalam lingkup struktur sosial dan lembaga lembaga kemasyarakatan, tetapi juga dalam bidang etika , moral, serta nilai-nilai budaya dari masyarakat itu sendiri. Dalam makalah singkat ini berusaha membahas tentang perubahan nilai-nilai budaya sebagai proses

modernisasi. Untuk keperluan kajian ini nilai-nilai budaya diartikan sebagai sesuatu yang abstrak, yang dijadikan pedoman serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan bertingka laku. Dan, kerangka analisis yang digunakan mengenai nilai-nilai budaya disini adalah apa yang pernah dikemukakan Sutan Takdir Alisjahbana dalam bukunya *Perkembangan sejarah Kebudayaan Indonesia Dilihat dari jurusan nilai-nilai (1977)*.

### **Perubahan Sosial Budaya**

Istilah perubahan sosial budaya sebenarnya mempunyai makna ganda, yakni perubahan sosial (social change) dan perubahan kebudayaan (culture change). Akan tetapi dalam prakteknya penggunaan istilah ini sering dicampur-adukkan saja, karena bila ditinjau dari segi proses keduanya saling berhubungan.

Sebelum masuk kepada pembahasan perubahan sosial budaya ini ada baiknya ditinjau lebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan pada dasarnya sebuah kemampuan dan anugrah yang diberikan Tuhan kepada manusia, sehingga membedakannya dengan makhluk manusia dengan makhluk lainnya (seperti binatang). Faktor utama yang memungkinkan manusia memiliki kebudayaan adalah karena manusia memiliki akal dan pikiran. Kecuali itu, faktor bahasa dan proses belajar juga dapat dikatakan sebagai faktor utama yang menunjang sehingga kebudayaan manusia dapat berkembang terus sepanjang hidupnya.

Pada umumnya masyarakat memahami dan memaknai kebudayaan itu dalam pengertian sempit, seperti kebudayaan adalah hasil seni, keindahan, tari-tarian. Padahal, jika kita renungkan secara mendalam pengertian dan makna kebudayaan itu memiliki cakupan yang cukup luas. Menurut seorang pakar yang dijuluki sebagai "*Bapak Antropologi Indonesia*" Koentjaraningrat (1990;180), dengan jelas mendefinisikan bahwa kebudayaan adalah "keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar".

Sementara Edward B. Tylor (dalam usman Pelly dan menanti, 1994:23), seorang ahli antropologi yang pertama merumuskan definisi tentang kebudayaan secara sistimatis dan ilmiah mengemukakan bahwa kebudayaan adalah "keseluruhan yang kompleks yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat". Dari definisi yang dikemukakan dua para ahli antropologi diatas cukup jelas dipahami bahwa cakupan kebudayaan itu sangat luas, bahkan secara ekstrim dapat dikemukakan bahwa apa saja dilakukan dan dihasilkan oleh manusia, dan semua itu dapat membawa manfaat bagi kehidupan manusia dalam masyarakat, itu dikatakan sebagai "kebudayaan".

Karena demikian luasnya cakupan kebudayaan, sejak awal A.L Kroeber (ahli antropologi) dan Talcott Parsons (ahli sosiologi) dalam sebuah artikel menarik berjudul "*The Concept Of Culture Of Sosial System*" (1958) menganjurkan agar membedakan antara kebudayaan sebagai suatu sistem dari gagasan-gagasan serta konsep-konsep, dan wujudnya sebagai rangkaian tindakan serta aktivitas manusia yang berpola. Atas dasar pendapat ini kemudian Koentjaraningrat (1980;186) membuat klasifikasi wujud kebudayaan ke dalam tiga bagian.

- 1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- 2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- 3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Berdasarkan kategori ini maka nilai budaya menempati wujud pertama dari kebudayaan, atau boleh dikatakan merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari kebudayaan atau adat istiadat. Koentjaraningrat (1971:18) mendefinisikan sistem nilai budaya (cultural value systems) sebagai rangkaian dari konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam pikiran sebagai dari warga suatu masyarakat, mengenai apa yang harus dianggap penting dan berharga, tetapi juga mengenai apa yang dapat dianggap remeh dan tak berharga dalam hidup. Dengan pengertian ini maka dapat dikemukakan bahwa sistem nilai budaya itu tidak saja berfungsi sebagai pedoman hidup, tetapi juga sebagai pendorong kelakuan manusia dalam hidup serta sistem tata kelakuan yang tinggi.

Dalam menjalani kehidupannya, setiap manusia dapat dipastikan akan mengalami perubahan-perubahan. Ditinjau dari segi bentuknya, proses perubahan yang terjadi bisa saja disadari bisa saja berlangsung tanpa disadari, perubahan itu bisa saja berlangsung secara cepat (revolusi) bisa saja berlangsung lambat dan memakan waktu yang cukup lama (evolusi), perubahan yang terjadi bisa saja membawahkan pengaruh luas atau besar terhadap diri manusia bisa saja mempunyai pengaruh yang sangat terbatas. Soejono Soekanto (2001:349) mengemukakan bahwa perubahan itu ada juga yang dikehendaki (intended-change) atau perubahan yang direncanakan (planned-change) dan ada perubahan yang tidak dikehendaki (unintended-change) atau perubahan yang tidak direncanakan.

Sementara bila ditinjau dari substansinya perubahan-perubahan masyarakat dapat terjadi mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya.

Perubahan sosial budaya biasanya terjadi karena adanya dorongan berbagai faktor, baik yang bersal dari dalam masyarakat sendiri maupun yang bersumber dari luar masyarakat. Menurut Imran Manan (1989) bahwa setiap perubahan mempunyai sebab, mempunyai cara, dan memiliki tujuan dan arah. Guna lebih menyederhanakan pemahaman terhadap masalah ini, Spindler membuat suatu model analisis atas beberapa faktor yang berinteraksi dalam proses perubahan sosial budaya. Menurut nya, paling tidak terdapat empat komponen yang berinteraksi, yakni: individu, interaksi sosial, lingkungan, dan kebudayaan itu sendiri.

### **Hakikat Modernisasi**

Sekalipun dalam kajian ilmu sosial “modernisasi” pada dasarnya sudah merupakan istilah umum, namun menurut Myron Weiner (1968) istilah sendiri sebenarnya masih terlalu kabur, Menurutnya, pada abad ke 19 dan permulaan abad ke-20, modernisasi umum nya dipakai untuk menunjukkan pertumbuhan rasionalisme dan sekulerisme, atau pada proses di mana manusia berhasil melepaskan diri dari tirani kekuasaan pemerintahan maupun belenggu takyul. Akan tetapi, dalam perkembangannya istilah modernisasi di gunakan sebagai kata ganti pertumbuhan ekonomi. Bahkan, menurut Weiner, istilah modernisasi tak jarang pula ditafsirkan secara sembarangan dengan kata “westernisasi”.

C.E Black sebagaimana yang dikutip Imran Manan (1989: 56) mendefinisikan modernisasi sebagai “...proses yang menggambarkan institusi-institusi yang lahir secara historis disesuaikan dengan fungsi-fungsinya yang berubah dengan cepat yang merefleksikan penambahan pengetahuan orang yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang telah memungkinkan orang mengontrol lingkungannya, yang menyertai revolusi ilmu pengetahuan”.

Disini nampaknya Black melihat konsep modernisasi secara historisnya, menyangkut dengan fenomena yang berlangsung di eropah barat. Sebagai ahli sejarah , dia melihat bahwa berkembangnya revolusi ilmu pengetahuan di Eropa Barat yang kemudian hari melahirkan ilmu pengetahuan modern dapat ditelusuri jauh kebelakang sejak zaman renaissance (pencerahan) yang terjadi pada abad ke-12. Revolusi intelektual yang berlangsung sejak abad ke-12 hingga abad ke -19 tersebut merupakan revolusi dalam bidang gagasan-gagasan tersebut alhirnya menyentuh ke seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti: revolusi ilmu pengetahuan, revolusi agama, revolusi industri, dan bahkan revolusi politik. Dan, semua revolusi tersebut banyak membawa banyak kemajuan (progress) di bidang intelektual, politik, ekonomi, sosial, dan psikologi.

Dengan pengertian demikian Myron Weiner akhirnya menyusun sebuah antologi “modernisasi” yang didalamnya dapat ditemukan seperti modernisasi kepercayaan-kepercayaan agama , modernisasi pendidikan , modernisasi hubungan –hubungan sosial , modernisasi manusia , modernisasi sistem hukum, modernisasi administrasi negara, modernisasi dunia usaha, modernisasi pertanian, modernisasi industri, dan modernisasi tenaga kerja.

Proses modernisasi dalam prakteknya mencakup proses-proses sosial dan kebudayaan yang ruang lingkupnya sangat luas. Dengan luasnya cakupan modernisasi tersebut akhirnya para ahli berpendapat bahwa titik tolak setiap rumusan modernisasi itu sebenarnya tidak terjadi pada segi watak masyarakat, tetapi justru terletak pada watak individu secara perorangan.

Bagaimana ciri-ciri seseorang yang dikatakan sebagai manusia modern sehingga membedakannya dengan sikap manusia tradisional ? Guru besar sosiologi dari *Harvard University*, Prof. Alek Inkeles dalam (Weiner, 1986) merinci setidaknya ada sembilan kategori seseorang itu dapat dikatakan memiliki ciri atau karakteristik manusia modern.

1. Kesediannya untuk menerima pengalaman-pengalaman yang baru dan keterbukaannya bagi pembaharuan dan perubahan
2. Mempunyai pendapat mengenai sejumlah persoalan-persoalan dan hal-hal yang tidak saja timbul di sekitarnya, tetapi juga di luarnya.
3. Pandangannya ditunjukkan pada masa kini dan masa depan, bukan ke masa lampau
4. Menginginkan dan terlibat dalam perencanaan serta organisasi, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar dalam hidupnya.
5. Adanya kemampuan untuk menyakini kemampuan manusia
6. Dapat memperhitungkan keadaan
7. Sadar akan harga diri dan harga diri orang lain
8. Percaya kepada ilmu dan teknologi , sekalipun dalam bentuk yang paling primitif
9. Percaya kepada keadilan dan pembagian

Kebudayaan Sebagai Penjelmaan Nilai-Nilai

Berbeda dengan pendapat Koentjaraningrat , ternyata sutan takdir Alisjabana (dalam alifian, 1985;145) yang memandangnya dari sudut pandang filsafat, melihat bahwa kebudayaan merupakan penjelmaan keaktifan budi manusia. Pemahaman seperti ini menurutnya sangat cocok dengan konteks Indonesia, dimana penggunaan istilah *budi* dan *daya* senantiasa saling berhubungan dalam memahami konsep kebudayaan. Dengan konsep dan pengertian seperti ini maka tidak salah kiranya jika Takdir Alisjabana melihat kebudayaan itu sebagai penjelmaan dari nilai-nilai .

Dalam rangka kajiannya Takdir Alisjabana mengutip pendapat Edward Spranger (1921) yang mengklasifikasi nilai-nilai kebudayaan manusia atas enam Kategori:

1. Nilai teori yang menentukan identitas sesuatu
2. Nilai ekonomi yang berupa utilitas atau kegunaan
3. Nilai agama yang berbentuk dan Heilige atau kekudusan
4. Nilai seni yang menjelmakan expressiveness atau keekspresian
5. Nilai kuasa atau politik
6. Nilai solidaritas yang menjelma dalam cinta, persahabatan, gontong royong dan lain-lain.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kebudayaan Indonesia bersipat majemuk (plural) dan proses terbentuknya kebudayaan nasional Indonesia itu juga tidak berlangsung sekaligus. Kebudayaan nasional Indonesia, sebagaimana yang dikaji Takdir Alisjabana (1977) karakteristik kebudayaan Indonesia terdiri atas lima lapisan, yakni 1) Kebudayaan Indonesia asli 2) Kebudayaan India 3) Kebudayaan Islam 4) Kebudayaan modern 5) Kebudayaan Bhineka Tunggal Ika.

#### A. Nilai-nilai Kebudayaan Asli Indonesia

Menurut sejumlah ahli sejarah budaya bahwa jauh sebelum masuknya pengaruh kebudayaan India, bangsa Indonesia sudah dihuni oleh kelompok manusia yang dikategorikan sebagai bangsa asli Indonesia. Namun setelah masuknya gelombang pengaruh India (yang sering disebut dengan ras *proto-melayan* dan *deutro-malayan*) nenek moyang asli bangsa Indonesia bagian timur.

Corak kebudayaan asli Indonesia sebelum kedatangan pengaruh India masih dikatakan memiliki cara berpikir yang kompleks, yang bersifat keseluruhan dan emosional atau amat dikuasai oleh perasaan. Ciri utama nilai-nilai kebudayaan Indonesia asli adalah dikuasai oleh *nilai agama*, yang kemudian diikuti oleh *nilai solidaritas* dan *nilai kesenian*, sedangkan dalam sifat yang berhubungan dengan demokratis, nilai kuasa dalam susunan masyarakat sangat lemah. Masyarakat sangat lemah. Karena pemikiran yang berasio belum berkembang maka *nilai ilmu* sangat lemah. Demikian halnya nilai ekonomi berkembang karena tidak ada motivasi yang kuat dalam hal kekayaan.

#### B. Nilai-nilai Kebudayaan India

Dengan masuknya pengaruh kebudayaan India (apakah itu agama Hindu dan Budha) maka nilai tertinggi dalam wajah kebudayaan Indonesia masih dikuasai oleh nilai agama. Hanya saja perbedaannya dengan nilai agama dalam kebudayaan Indonesia asli ialah bahwa nilai agama dalam kebudayaan India itu lebih berasio dan lebih maju, serta memiliki sistem pemikiran ke segala penjuru. Nilai kedua yang mempengaruhi kebudayaan India bukanlah nilai solidaritas sebagaimana yang berlaku dalam kebudayaan Indonesia asli. Nilai kuasa masih berpusat kepada kedudukan dewa-dewa dan turun bertingkat-tingkat sampai ke makhluk yang tingkat rendah.

Nilai teori dan nilai ekonomi masing-masing dianggap lemah, namun karena pengaruh perkembangan rasionalitas dan bertambah lesunya perhubungan dan kecakapan di bidang membaca dan menulis kedua nilai ini semakin mengalami kemajuan. Yang kurang mendapat perhatian dalam periode ini adalah nilai solidaritas. Hal ini disebabkan karena sistem feodal dan sistem kasta yang terdapat dalam kebudayaan India.

#### C. Nilai-nilai Kebudayaan Islam

Lapisan ketiga yang mewarnai wajah kebudayaan nasional Indonesia adalah kebudayaan Islam. Mengenai soal darimana datangnya pengaruh kebudayaan ini masih bersimpang siur. Ada yang mengatakan bahwa Islam yang datang ke Indonesia itu adalah Islam yang langsung berasal dari tanah Arab sendiri serta dibawah dan dikembangkan oleh

orang arab sendiri. Sementara itu ada pula yang mengatakan bahwa pengaruh islam yang masuk ke Indonesia itu berasal dari Gujarat dan dikembangkan oleh para pedagang-pedagang Islam yang berasal dari india. Hal ini tentu saja penting dalam rangka kajian tentang wajah islam di Indonesia itu sendiri.

Dalam kebudayaan Islam, nilai agama sangat memegang peran penting dan kuat sekali. Kecuali itu, nilai ilmu dan nilai ekonomi juga mendapat pengaruh yang kuat. Ini barangkali sejalan dengan perkembangan dan kejayaan Islam dunia dari abad ke- 8 hingga abad ke-13.

#### D. Nilai-Nilai Kebudayaan Modern

Kebudayaan modern yang dimaksudkan disini adalah pengaruh kebudayaan Eropa dan amerika . Tampaknya dalam kontek ini Takdir Alisjabana (1977:30-35) tidak melihat kebudayaan modern ( dalam hal ini eropa) yang mempengaruhi kebudayaan nasional Indonesia dari sudut pandang kolonialisme dan imperialisme . Ciri terpenting dalam kebudayaan moderen ini menurutnya adalah semangkin berkembangnya kekuatan disiplin, cara-cara berpikir dan penyelidikannya yang menuju pengetahuan positif.

Dalam kebudayaan modern ditandai dengan kuatnya nilai ilmu dan nilai ekonomi, sedangkan nilai agama dan nilai seni semangkin menunjukkan kelemahannya, sebagaimana yang terlihat dalam krisis agama dan seni di Eropa dan Amerika dewasa ini. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, sangat menjunjung tinggi nilai solidaritas, sementara di negara-negara totaliter seperti di Rusia yang paling kuat adalah nilai kuasa.

#### Perubahan Nilai-Nilai Budaya

Dalam pembahasan ini modernisasi dipahami sebagai serangkaian perubahan nilai-nilai dasar yang berupa nilai teori,nilai sosial, nilai ekonomi ,nilai kuasa(politik), nilai estetika, dan nilai agama. Dalam kajian ini nilai estetika sengaja tidak dibahas secara tersendiri, sebab nilai estetika sangat dipengaruhi oleh perubahan kelima nilai dasar lainnya. Sifat nilai dasar yang universal sifatnya dalam perwujudannya yang berupa sikap dan prilaku harus mengacu kepada pandangan hidup dan kepribadian masyarakat itu sendiri.

Dengan anggapan ini secara jelas dikemukakan bahwa modernisasi adalah adopsi dari sikap dan prilaku manusia , manusia-manusia negara lain yang telah moderen. Yang kita terima adalah nilai dasar modernisasi yang bersifat universal itu. Yang dalam penjabarannya dalam sikap prilaku, didasarkan kepadapandangan hidup dan kepribadian kita sendiri. Peradaban Indonesia yang moderen tidak akan serupa dengan negara –negara maju lainnya, sebab kebudayaan Indonesia yang moderen mengacu kepada Pancasila , yang merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Modernisasi pada dasarnya merupakan kehidupan yang ditata secara rasional dan efisien dengan pembagian kerja dikalangan anggota masyarakatnyaberdasarkan spesialisasi pekerjaan dengan didukung oleh kelembagaan yang berdasarkan hukum.

Nilai teori sangat meninggikan rasionallitas dan efisiensi yang tercermin dalam cara berfikir, pemecahan masalah dan peralatan, serta pengelolaan sumber daya manusia . Itulah sebabnya maka ilmu dan teknologi , yang merupakan perwujudan dari aspek rasionallitas dan efisiensi, merupakan penopang utama sebuah masyarakat moderen. Cara berpikir masyarakat tradisional yang bersifat non-analitis (holistik/intuitif) bergeser kearah pemikiran yang bersifat analitis. Demikian halnya juga pengelolaan sumber daya yang dalam masyarakat tradisional didasarkan kepada kebiasaan bergeser kearah efisiensi : baik efisiensi teknis maupun ekonomis.

Dalam nilai sosial, modernitas mendasarkan pembagian kerja berdasarkan keahlian yang harus ditunjukkan dalam prestasi kerja. Untuk itu, maka pembentukan tenaga kerja yang bersifat “*generalis*” yang ditempa oleh pengalaman dalam masyarakat tradisional bergeser menjadi tenaga kerja yang mempunyai spesialisasi tertentu sebagai produk dari pendidikan formal. Penilaian kemampuan kerja dalam masyarakat moderen didasarkan kepada tolak ukur yang bersifat objektif yakni prestasi kerja; berlainan dengan masyarakat tradisional yang mempergunakan status sebagai sandaran penilaian. Dengan demikian maka masyarakat yang berorientasi kepada status akan bergeser ke arah prestasi kerja.

Sistem perekonomian pada masyarakat tradisional mempunyai ciri subsistem (cukup memenuhi kebutuhan dasar) dengan insentif yang bersifat moral dan sosial. Dalam masyarakat moderen sistem ekonomi mengejar pemuasan kebutuhan yang berlimpah dengan mekanisme pasar yang berdasarkan insentif ekonomi. Untuk itu dalam masyarakat moderen dituntut kemampuan untuk bekerja keras sebab pemenuhan kebutuhan hidup tidak berhenti pada kebutuhan dasar saja tetapi mempunyai alternatif yang lebih banyak. Pola perekonomian masyarakat yang konsumtif bergeser ke arah pola perekonomian produktif. Demikian juga dengan meningkatnya pendidikan dan berkembangnya tradisi tulisan sebagai media deseminasi pengetahuan maka privelise status dan senioritas menjadi surut kebelakang. Dalam masyarakat tradisional yang bertumpu pada sarana komunikasi lisan sebagai penyambung pengetahuan maka mereka yang lebih senior dianggap lebih menguasai permasalahan disebabkan karena lebih berpengalaman. Dalam masyarakat moderen kadar penguasaan itu bergeser kepada pendidikan dan intensitas penimbaan pengetahuan dari sumber-sumber yang tersedia secara tertulis. Hal ini menimbulkan pergeseran dalam proses pengambilan keputusan yang lebih didasarkan kepada pertimbangan diri sendiri dari pada pertimbangan orang lain. Karakteristik pengambilan keputusan secara individual ini tercermin dalam pengambilan keputusan yang lebih luas umpamanya dalam pengambilan keputusan politis. Demokrasi dalam masyarakat moderen pada hakekatnya merupakan perwujudan pengambilan keputusan individu yang “*di-pool*” secara kolektif.

Gabungan cara berfikir analitis, kecenderungan untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, suburnya potensi pemenuhan kebutuhan yang beranekaragam, dan proses pengambilan keputusan politis yang bersifat demokratis, menyebabkan masyarakat moderen berorientasi kepada kemajuan dan perubahan. Keadaan ini berbeda dengan masyarakat tradisional yang berorientasi kepada stabilitas dan cenderung menolak perubahan. Kecenderungan mempertahankan *status quo* ini biasanya terkait dengan persepsi keagamaan yang bersifat fatalistis. Dalam mau memberikan pengaruh terhadap proses modernisasi di negara kita, memperbaiki nasib ke arah kehidupan yang lebih baik.

Ketergantungan dan keterkaitan umat manusia secara universal ini, baik secara ekonomi maupun secara sosial, budaya, mau tidak mau memberikan pengaruh terhadap proses modernisasi di negara kita, baik pengaruh yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Kedua pengaruh ini harus diperhitungkan dalam proses pengembangan kebudayaan nasional, sebab pada suatu pihak modernisasi berarti mensejajarkan diri dalam kemajuan umat manusia dengan negara –negara lain. Sedangkan pada pihak lain kita ingin mempertahankan ciri khas peradaban Indonesia dalam mengembangkan kebudayaan. Kontelasi ini semangkin memperjelas adanya keharusan bagi kita untuk mengkaji secara mendalam hakikat dan tujuan pengembangan kebudayaan Indonesia itu sendiri.

Berdasarkan kerangka berfikir diatas perlu kiranya disusun kebijaksanaan pembangunan sosial budaya secara terpadu. Kebijakan tersebut pada hakikatnya terdiri atas dua hal utama. *Pertama* , menyangkut kebijaksanaan dasar yang merupakan unsur

pemersatu (*the common denominator*) dari segenap sektor kebudayaan. *Kedua*, pokok-pokok kebijaksanaan masing-masing sektor kebudayaan yang satu dengan yang lain terkait dengan unsur pemersatu tersebut. Kebijaksanaan dasar pembangunan sosial budaya hendaknya diarahkan kepada beberapa sasaran utama. *Pertama*, penerusan dan pembentukan nilai yang mengacu kepada warisan kebudayaan Indonesia yang luhur, kehidupan berbangsa dan bernegara, serta nilai-nilai universal manusia moderen. Nilai-nilai tersebut bukan saja berupa penguasaan pengetahuan, tetapi sekaligus membentuk sikap yang tercermin dalam perbuatan. *Kedua*, pengembangan perangkat (kelembagaan) sosial yang berpijak kepada nilai-nilai budaya luhur, atas berbangsa dan bernegara, serta penerapan konsep-konsep moderen. Pengembangan kelembagaan (*intitusionalisasi*) ini bukan saja menyangkut struktur tetapi juga proses, bukan saja prosedur tetapi juga nilai-nilai tindakan yang membudaya dan mengikat kelompoknya. *Ketiga*, pengembangan kondisi objektif yang mendorong pelebagaan nilai-nilai yang ingin ditumbuhkan tersebut baik pada manusia perorangan maupun perangkat sosial, *Keempat*, penyediaan prasarana dan sarana sosial yang mendukung terwujudnya ketiga tujuan diatas.

### Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat dikemukakan bahwa perubahan sosial budaya akibat proses modernisasi adalah sesuatu yang tak bisa dihindarkan. Terlebih lagi di era globalisasi dewasa ini yang ditandai dengan revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi, revolusi informasi, serta revolusi dibidang telekomunikasi secara nyata turut berpengaruh terhadap nilai-nilai dan tata kehidupan masyarakat. Transformasi dalam menentukan perubahan yang bersifat akseleratif itu bagi sebahagian pihak bisa saja mengakibatkan *cultural lag* (ketertinggalan budaya) dan bisa juga dalam *cultural shock* (kegoncangan budaya).

Berdasarkan kenyataan diatas, suatu hal yang perlu dicermati adalah bagaimana perubahan nilai-nilai itu bisa saja bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri dan diperkuat oleh penetrasi kebudayaan dari luar yang disebabkan oleh kian intensifnya arus informasi dan interaksi antar kebudayaan di muka bumi. Sementara, dalam taraf perkembangan peradaban yang lebih maju umat manusia saling tergantung satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhan dan jaminan kelangsungan hidupnya (*survival*). Sebab, hampir tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa *bereksistensi* tanpa *koeksistensi* dengan negara-negara lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, ed. (1985) *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Alisjahbana, S. Takdir (1977) *Perkembangan Sejarah Kebudayaan Indonesia Dilihat dari Jurusan Nilai – nilai*, Jakarta: Indayu Press.
- .....(1981) “Pembangunan Kebudayaan Indonesia di Tengah Laju Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” dalam *Prisma*, No. 11, November 1981.
- Gama, Yudistira K. (1992) *Teori – teori Perubahan Sosial*, Bandung: Program Pascasarjana – Universitas Padjadjaran.
- Kaplan, David, Robert A. Manners (1999) *Teori Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat (1980) *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- .....(1969) *Rintangan – rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, Jakarta: Bhratara.
- Lauer, Robert H. (1993) *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta.



- Manan, Imran (1989) “Perubahan Sosial Budaya, Modernisasi dan Pembangunan” dalam *Dasar – dasar Sosial Budaya Pendidikan*, Jakarta: P2LPTK.
- Pelly, Usman, Asih Menanti (1994) *Teori – teori Sosial Budaya*, Jakarta: PPPMTK DIKTI Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soekanto, Soerjono (2001) *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suriasumantri, Jujun S. (1986) *Ilmu dalam Perpektif Moral, Sosial, dan Politik*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Weiner, Myron (1986) *Modernisasi, Dinamika Pertumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.